

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA STUDI KASUS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA BONDOWOSO

Nabila Salsabila¹, Dania Puspita Ayu², Khoirul Umam³,
Muhammad Fauzinuddin Faiz⁴

nabilasalsabila3103@gmail.com¹, daniapuspitaayu@gmail.com², umamk5044@gmail.com³,
mufaddin@uinkhas.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi sistem akuntansi pada Kantor Kementerian Agama, terutama di Direktorat Keuangan dan Aset. Latar belakang permasalahan mencakup kebutuhan akan evaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan kantor kementerian agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak penerapan sistem akuntansi di Direktorat Keuangan dan Aset, dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pelaksanaan penelitian melibatkan wawancara dan survei langsung di tempat tersebut, memungkinkan analisis praktek implementasi sistem akuntansi. Waktu pelaksanaan penelitian mencakup periode tertentu yang tidak disebutkan dalam data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi di Direktorat Keuangan dan Aset memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset di Kantor Kementerian Agama. Meskipun demikian, kendala yang dihadapi melibatkan pemahaman terbatas tentang sistem baru, kekurangan SDM terampil dalam penggunaan aplikasi, dan kurangnya dukungan manajemen. Simpulan penelitian menyarankan peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi staf, serta dukungan manajemen yang lebih besar untuk memastikan kesuksesan implementasi sistem akuntansi di Kantor Kementerian Agama. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu penyempurnaan kebijakan dan praktik di tingkat institusi pemerintah, khususnya terkait manajemen keuangan dan aset di lingkungan Kantor Kementerian Agama. aplikasi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan setiap Kementerian Negara/Lembaga juga telah digunakan di Kantor Kementerian Keuangan. Pengembangan sistem ini adalah proses modifikasi atau penggantian sebagian atau keseluruhan sistem informasi. Aplikasi SAIBA sebagai sistem akuntansi keuangan (software) yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Ke efektivitasan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sangatlah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Hasil uji pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan hasil tersebut sangat menunjukkan keefektivitasan laporan keuangan.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Akuntansi, Kementrian Agama.

ABSTRACT

The research was conducted to analyse the implementation of the accounting system at the Office of the Ministry of Religion, especially at the Directorate of Finance and Assets. The background of the issue included the need to evaluate the efficiency and effectiveness of financial and asset management in the environment of the office of the ministry of religion. The research method used is qualitative descriptive with a case study approach. The conduct of research involves interviews and live surveys at the venue, enabling the analysis of practice implementation of accounting systems. The duration of the study covers certain periods not mentioned in the data. The results of the research show that the implementation of the accounting system in the Directorate of Finance

and Assets has a significant positive impact on the efficiency and efficiency of financial and asset management in the Office of the Ministry of Religion. Nevertheless, the obstacles encountered included limited understanding of the new system, a lack of skilled SDMs in the use of applications, and a shortage of management support. The research findings suggested improved training and education for staff, as well as greater management support to ensure the successful implementation of the accounting system in the Office of the Ministry of Religion. Implications of this research could help to improve policies and practices at the level of government institutions, especially related to financial and asset management in the environment of the Department of Religious Affairs. The Office of the Ministry of Finance has also developed an application that has been used in cash toward accrual (SAI) to be used by each State Ministry/Agency. The system development is the process of modifying or replacing part or the entire information system. SAIBA application as a financial accounting system (software) used in the preparation of financial reports. Effectiveness of Application of Government Accounting Standards influences the quality of financial reporting at the Office of the Ministry of Religion.

Keywords: Implementation, Accounting System, Ministry of Religious Affairs.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan tuntutan keterusterangan dan tanggung jawab pelaksanaan kemandirian wilayah dalam bidang administrasi moneter daerah, organisasi pemerintah diharapkan menyelesaikan administrasi moneter dan bertanggung jawab atas pelaksanaan moneternya sesuai dengan tugas pokok dan kemampuan yang bergantung pada persiapan penting yang telah ditetapkan. . Untuk memenuhi komitmen ini, melaksanakan struktur eksposur keuangan yang sesuai, jelas dan terukur sesuai dengan norma keaslian dan tanggung jawab adalah hal yang penting. Oleh karena itu, diperlukan upaya perubahan dan perbaikan yang tiada henti, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, sehingga dapat dibentuk struktur yang sesuai.

Perubahan dalam kehidupan politik masyarakat dan teritorial sangatlah di harapkan atas perubahan yang di perjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu rencana perubahannya adalah desentralisasi moneter dan kemandirian daerah. Mengenai desentralisasi moneter dan kemandirian provinsi yang berhubungan dengan administrasi moneter, suatu paket yang telah di keluarkan pemerintah tentang pengelolaan keuangan negara yaitu: Penetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan.

Dewan dan Kewajiban Dana Negara. Peraturan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penyesuaian Moneter Fokal dan Teritorial, Undang-undang Tidak Resmi Nomor 58 Tahun 2005 tentang Administrasi Moneter Provinsi, Pedoman Penyelenggaraan Moneter Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Aturan Penyelenggaraan Moneter Daerah. Diterbitkannya Pedoman Penyelenggaraan Pendeta Rumah Tangga Nomor 59 Tahun 2007 tentang penyesuaian Pedoman Penyelenggaraan Pendeta Rumah Tangga Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Tertib Administrasi Moneter. Selain itu juga terdapat Peraturan Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga memerlukan landasan undang-undang tidak resmi tentang Pedoman Pembukuan Pemerintah. Pedoman dan peraturan yang berbeda mengenai administrasi moneter telah disusun sebagai titik awal yang kuat bagi direktur keuangan negara untuk mewujudkan administrasi yang baik dan pemerintahan yang bersih. (Nurlaela, 2010:2).

Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah sesuatu yang bisa membantu pihak perusahaan untuk mencari calon para tenaga kerja yang

berkualitas tinggi. Dilaksanakannya Praktik Pengalaman Lapangan ini sesuai dengan ketentuan serta kebutuhan dari mahasiswa dan mahasiswi. Untuk menyelesaikan kegiatan praktik pengalaman lapangan ini, Mahasiswa dan mahasiswi harus mulai mengembangkan pemberdayaan diri serta memperluas pengetahuan. Selain dengan keterampilan, pengetahuan spesialis, pandangan jauh ke depan, kedisiplinan dalam pekerjaan yang tinggi dan adanya tanggung jawab agar mereka menjadi para pekerja yang berkualitas dan unggul dalam segala bidang pekerjaan.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi yang merupakan kombinasi antara pengalaman praktik pendidikan, penelitian, dan juga kegiatan pengabdian terhadap masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Praktek Pengalaman Lapangan ini merupakan demonstrasi dari teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan, yang kemudian diterapkan dalam praktek sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sedangkan kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mempelajari permasalahan yang dihadapi ditempat pelaksanaan praktek lapangan. Dalam hal ini, kegiatan pengabdian berupa pemagangan yang dilakukan selama masa 30 hari kerja yang telah ditentukan oleh fakultas ekonomi dan bisnis islam.

Kantor Pelayanan Agama adalah organisasi yang disertai tugas mengatur urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam mengawasi pemerintahan negara. Selain itu, dinas keagamaan juga berfungsi untuk menentukan, memutuskan dan melaksanakan pengaturan di bidang pengarahan kelompok masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, serta pendidikan yang ketat dan ketat. Kantor Dinas Agama juga memiliki beberapa struktur hierarki, antara lain: Kepala Kantor, Kasubbag Organisasi, Pengarah Islam, PAIS, PHU (penyelenggaraan haji dan umrah), PD Pontren (pelatihan sekolah pengalaman hidup Islam), Keuangan, NAIK, Pendma, Zawa. Dimana Divisi Pengarahan Islam sendiri mempunyai tugas, pengarahan pernikahan bagi calon pengantin di Bondowoso : sebagai wadah edukasi tentang kasih sayang dan kekeluargaan. Daerah PAIS mempunyai tugas untuk menyerahkan pengesahan tanah wakaf. Pada bidang sekolah Islam all-inclusive mempunyai tugas memberikan arahan khusus kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam terkait dan sekolah-sekolah Islam yang tinggal di dalamnya. Bidang PDMA bertugas mengumpulkan informasi mengenai UKM madrasah. Sementara itu, daerah zawa mempunyai tugas memberikan bimbingan dalam hal akomodasi zakat dan selanjutnya memberikan bimbingan kepada para wakif dalam memberikan wilayahnya. Oleh karena itu, dalam bentuk hardcopy laporan ini kami akan mengkaji pemeriksaan pelaksanaan rangka pembukuan pada Kantor Dinas Agama Bondowoso. Dengan pendalaman ini kami ingin mengetahui proyek-proyek apa saja yang ada di Kantor Dinas Agama, dan bagaimana kerangka pembukuan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Agama, khususnya di Kantor Dinas Agama Rezim Bondowoso, dan dengan kajian ini kami ingin mengetahui mengetahui kelayakan pelaksanaan pembukuan itu sendiri di kantor Dinas Agama. Selain itu, pemeriksaan ini juga dilakukan agar pencipta dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas program kerja apa saja yang tersedia di Kantor Kemenag, khususnya di Kantor Kemenag Bondowoso.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi tahap pralapangan, tahap lapangan, analisis data, dan pelaporan.

1. Di tahap pra-lapangan, peneliti melakukan persiapan sebelum melakukan

penelitian lapangan. Persiapan ini mencakup menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, melakukan observasi untuk mengumpulkan data sekunder, dan mengatur jadwal wawancara dengan informan.

2. Pada tahap proses lapangan, peneliti mengumpulkan data dari lokasi lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data ini tentunya dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, termasuk pembuatan catatan lapangan dan pengambilan foto bersama informan.
3. Pada tahap analisis data, peneliti mentranskripsi wawancara dan menyusun data primer dan sekunder yang telah terkumpul secara teratur agar dapat dipahami oleh pembaca.
4. Tahap pelaporan adalah langkah terakhir dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun laporan yang berisi kesimpulan dari proses lapangan. Laporan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif dan disebut sebagai Laporan Kolaboratif dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kerja:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan kantor, termasuk memberikan arahan kepada staf dan merancang rencana strategis untuk mencapai tujuan kantor. Tugasnya juga mencakup menyusun program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), termasuk pelatihan karyawan agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif. Selain itu, ia bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kantor serta penyusunan anggaran kantor, termasuk alokasi dana untuk berbagai kegiatan, proyek, dan program yang direncanakan.
2. Sub bagian Tata Usaha bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyusunan surat-menyurat resmi, seperti surat tugas, surat keputusan, dan surat lainnya. Mereka juga bertanggung jawab untuk membuat dan mengelola anggaran kegiatan kantor serta menangani administrasi keuangan, termasuk pembayaran tagihan dan pelaporan keuangan. Selain itu, mereka juga menangani administrasi kepegawaian, termasuk pengelolaan data pegawai, absensi, dan mutasi pegawai.
3. Seksi Pendidikan Madrasah memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan teknis kepada guru dan tenaga kependidikan di madrasah serta mengkoordinasikan pelatihan dan pengembangan kompetensi mereka. Mereka juga bertugas menyelenggarakan dan mengelola proses ujian dan evaluasi akademik di madrasah serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur evaluasi. Selain itu, mereka berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, dan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan.
4. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren bertanggung jawab untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum pendidikan di lembaga-lembaga tersebut, merancang kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan mengelola program pembinaan mutu pendidikan. Mereka juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan dan memantau kegiatan pembelajaran di diniyah dan pondok pesantren.
5. Seksi Pendidikan Agama Islam memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam serta merancang kebijakan

untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di berbagai tingkat. Mereka memberikan bimbingan teknis kepada guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah agama Islam, melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut, dan mengevaluasi capaian prestasi serta kinerja sekolah. Selain itu, mereka memberdayakan dan memberikan dukungan kepada Komite dan pengelola sekolah agama Islam serta mengkoordinasikan kegiatan mereka untuk mendukung pengembangan pendidikan.

6. Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, Menyusun perencanaan pelaksanaan ibadah haji, termasuk alokasi kuota, pelayanan jemaah, dan keberangkatan, dan Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan haji. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan haji untuk perbaikan di masa mendatang. Berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti maskapai penerbangan, otoritas bandara, dan pihak berwenang di Arab Saudi. Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dalam rangka memastikan kelancaran operasional haji.
7. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam bertanggung jawab memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat Islam terkait aqidah, ibadah, akhlak, dan norma-norma keagamaan lainnya. Mereka juga melaksanakan kegiatan seperti khotbah, ceramah keagamaan, dan pengajian untuk meningkatkan pemahaman agama di kalangan masyarakat. Selain itu, mereka memberikan pendampingan dan bimbingan kepada individu atau kelompok dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari dengan perspektif keagamaan.
8. Penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2010, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, telah menyebabkan perubahan penting dalam penyajian laporan keuangan dan manajemen keuangan secara menyeluruh. Beberapa perubahan dan keuntungan yang diperoleh dari penerapan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Penyesuaian Status Ekuitas Dana

Ada penyesuaian pada pos ekuitas dana dalam neraca per 31 Desember 2023 yang sebelumnya berlandaskan kas, yang kini telah diubah menjadi ekuitas sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih akurat dalam merepresentasikan keadaan keuangan organisasi.

Hambatan dalam Perbandingan Tahunan

Meski ada kendala dalam membandingkan akun-akun antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas akibat penerapan akuntansi berbasis akrual yang dimulai pada 2010, tetapi hal ini diimbangi oleh keuntungan penyajian informasi yang lebih akurat dan rinci dari tahap penganggaran hingga pelaporan.

Manfaat Pengelolaan Keuangan

Keuntungan utama dari penerapan akuntansi berbasis akrual terlihat dalam pengelolaan keuangan, di mana informasi yang lebih akurat dan terperinci disajikan. Ini memberikan kemampuan kepada pengguna untuk dengan jelas mengidentifikasi posisi keuangan Kantor Kementerian Agama dan perubahan yang terjadi.

Pemahaman yang Lebih Mendalam

Laporan keuangan berbasis akrual memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemampuan modal, pendapatan, dan aset Kantor Kementerian Agama. Detail yang lebih jelas ini dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan keuangan dan alokasi sumber daya.

Penyelarasan Pendekatan Akuntansi

Meskipun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemenag Jepara saat ini menggunakan basis kas, pernyataan bahwa jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA akan disusun berdasarkan basis akrual, menunjukkan konsistensi dalam pendekatan akuntansi di seluruh organisasi.

Penerapan akuntansi berbasis akrual di Kementerian Agama telah membawa dampak positif dalam manajemen keuangan dan penyajian informasi keuangan yang lebih relevan dan transparan. Ini dapat mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan secara keseluruhan. Kementerian Keuangan telah mengembangkan aplikasi SAIBA untuk menggantikan Sistem Akuntansi Instansi yang sebelumnya berbasis kas, dengan tujuan memudahkan Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Penting bagi operator aplikasi SAIBA untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang akuntansi dasar guna mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual. Dengan penerapan basis akrual, laporan keuangan diharapkan menjadi lebih komprehensif, sesuai dengan prinsip pengungkapan penuh, untuk memastikan informasi yang disajikan jelas, lengkap, dan akurat mengenai kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintahan.

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan entitas pemerintah, khususnya di Kantor Kementerian Agama. Variabel efektivitas penerapan standar tersebut memiliki pengaruh sebesar 97,6% terhadap kualitas laporan keuangan, sementara 2,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menetapkan tahun 2015 sebagai tahun di mana pemerintah harus menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual mencakup prinsip-prinsip akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu, SAP juga mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendekatan ini mendukung implementasi prinsip akuntansi berbasis akrual dalam konteks pelaksanaan anggaran.

Secara umum, hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berperan secara signifikan dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Agama. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, seperti riset yang dilakukan oleh Nuraini dan Sumiyati (2014) yang menunjukkan dampak yang signifikan dari penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula, penelitian oleh Ningtyas dan Widyawati (2015) mengungkapkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Ada beberapa program kerja yang harus dilaksanakan dari kantor Kementerian agama, khususnya kantor agama kabupaten Bondowoso antara lain :

1. Kepala Kantor Kemenag bertanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan di kantor, termasuk mengarahkan staf dan menyusun rencana strategis untuk mencapai tujuan kantor. Sub Bagian Tata Usaha, dan Mengelola dan menyusun surat-menyurat resmi, seperti surat tugas,

surat keputusan, dan surat-surat lainnya. Seksi Pendidikan madrasah, Memberikan bimbingan teknis kepada guru dan tenaga kependidikan di madrasah. Mengkoordinasikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik. Seksi Pendidikan diniyah dan pondok pesantren, Menyusun dan mengembangkan kurikulum pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Merancang kebijakan terkait peningkatan mutu pendidikan di lembaga-lembaga tersebut. Seksi Pendidikan Agama Islam, Menyusun dan mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam, Merancang kebijakan terkait peningkatan mutu pendidikan agama Islam di berbagai tingkatan, Memberikan bimbingan teknis kepada guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah agama Islam. Penerapan sistem akuntansi di Kantor Dinas Agama, pelaksanaan pokok pembukuan berbasis akumulasi di Kantor Dinas Agama Rezim Bondowoso dimulai pada tahun 2010. Badan publik menyelenggarakan pembukuan berbasis akumulasi sesuai perintah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Norma Pembukuan Pemerintah. Eksekusi ini mempengaruhi beberapa hal dalam pengenalan laporan moneter. Pertama, nilai cadangan dalam pencatatan moneter per 31 Desember 2023 yang berbasis pengumpulan uang tunai diubah namanya menjadi nilai sesuai pembukuan berbasis akumulasi. Kedua, kesetaraan pengenalan akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam laporan Fungsional Tanpa Akhir tentang Perubahan Nilai tidak dapat dicapai. Hal ini dikarenakan penataan dan penyelenggaraan pembukuan berbasis pengumpulan yang mula-mula mulai dilakukan pada tahun 2010. Dimaklumi pula bahwa kapasitas Dinas Agama seperti permodalan, gaji dan sumber daya juga dapat dipisahkan dan digambarkan dengan jelas menggunakan premis pertemuan. Dalam hal penyusunan rencana belanja yang tergabung dalam CaLK, Laporan Pengakuan Rencana Belanja Dinas Agama Jepara sudah siap atas dasar uang, yang berarti bahwa penerimaan gaji dan dana dirasakan pada saat uang diterima di Catatan Uang Umum Negara. Atau menurut substansi yang dirinci; serta konsumsi, perpindahan dan kegunaan penunjang dirasakan pada saat uang dikeluarkan dari Catatan Uang Umum Negara. Namun, jika anggaran sudah siap dan dilaksanakan berdasarkan landasan akumulasi, maka LRA siap berdasarkan landasan pengumpulan.

2. Kelayakan penggunaan norma pembukuan pemerintah mempengaruhi sifat laporan moneter pada Kantor Pelayanan Agama. Konsekuensi pengujian dampak kelayakan penggunaan prinsip pembukuan pemerintah terhadap sifat laporan moneter pemerintah: Mengingat konsekuensi pengujian yang telah dilakukan terhadap dampak kelayakan penggunaan pedoman pembukuan pemerintah pada sifat laporan moneter pemerintah menunjukkan T hitung sebesar 33,968 dengan nilai kepentingan sebesar $0,021 < 0,05$ dan konsekuensi uji relaps menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,930 yang menunjukkan bahwa variabel kelayakan pelaksanaan norma pembukuan pemerintah terhadap sifat laporan moneter pemerintah berdampak pada sifat laporan moneter pemerintah. Dampak kelayakan penerapan prinsip pembukuan pemerintah terhadap sifat laporan moneter pemerintah adalah sebesar 97,6% dan kelebihanannya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak dianalisis dalam eksplorasi ini. Sesuai dengan rentang waktu pelaksanaan penghimpunan berdasarkan Pedoman Pembukuan Pemerintah (SAP) yang diatur dalam undang-undang tidak resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbariah, F., & Suratno. (2018). Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Instansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan di Kementerian Agama Propinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1).
- Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta :Salemba Empat.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (Edisi Ketu). Salemba Empat.
- Darma, J., & Sagala, G. H. (2020). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Studi Empiris di Indonesia). *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(1).
- Faradillah, A. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010). Universitas Hasanuddin.
- Firdaus, D., Suyoga, D. sigit, & Latifah, S. W. (2015). Evaluasi Penerapan PP No 71 Th 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*.
- Indrianto, N., Bambang, S., & Dkk. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi Satu). BPFE.
- Indriantoro, S. (2002). *Metode Penelitian Bisnis*. BPFE.
- Kartika, J. C., & Budiono, E. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Akuntansi Instansi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E-Proceeding of Management*, 2(3).
- Kasfari, A., & Abdullah, S. (2019). Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal (SAIBA) pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(2).
- KMA Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Kementerian Agama, (2015).
- Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. (Malang: 2013), h. 42